

Membaca Proyek Demokratisasi Bernama Pemilu :

Melacak intrik, hegemoni dan resistensi demokrasi

Sutrisno*

Wacana politik tahun 90-an merupakan era dominasi wacana demokrasi¹. Mempertanyakan dan mengkritisi demokrasi sebagai upaya eksperimen pencarian alternatif sistem politik diluarnya merupakan kekonyolan. Resultantnya dibangun sejak bubaranya Uni Sovyet dan terbukanya Cina atas pasar bebas². Jika misalnya ada akademisi mencoba membaca ulang –mengkritisi demokrasi– ia segera mendapat label sebagai ‘tidak akademis’ atau bahkan mendapat julukan ‘bagian dari kekuatan lama’. Demokrasi bukan lagi sebagai alternatif tentang sebuah tatanan ideal, namun telah menjadi ‘kenyataan’ imperatif (*imperatively reality*) yang mengkonstruksi pandangan dunia (*world view*) manusia pada hari ini. Meskipun upaya

menghadirkannya dalam praktek sosial bukan tanpa ongkos besar, telah menjadi formula bahwa upaya penegakan demokrasi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi (*economical growth*). Seymour Martin Lipset³, misalnya, mengemukakan variabel ekonomi menjadi syarat yang tidak dapat ditawar (*sufficient*) bagi hadirnya ‘mentalitas’ demokrasi. Pada bagian lain Lipset menyebutkan, “*Perhaps the most common generalization linking political systems to other aspects of society has been that democracy is related to the state of economic development*”⁴.

Ketika belakangan konsep demokrasi ini didiskusikan dengan kritis justru atas nama demokrasi, konsep tipe ideal ini semakin menegaskan keunggulan dari alternatif

* Penulis sebelum aktif di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah Ketua Departemen Sosiologi pada The International Institute of Islamic Thought- Indonesia, sebuah NGO yang bergerak di bidang kontekstualisasi pemikiran Islam.

¹ Perhatikan misalnya, John Markoff. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia*, terj. Ari Setyaningrum, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 21.

² Meletakkan fenomena Uni Sovyet dan Cina sebagai terminal resultante demokrasi dipandang *chauvinistik* oleh beberapa kalangan. Jatuhnya Reza Pahlevi tahun 1978 dan kemenangan FIS di Aljazair tidak pernah dipandang sebagai *entry point* terhadap resultante demokrasi. Maka disini demokrasi dipandang sebagai realitas tunggal dan universal, tidak mempunyai varian

³ Seymour Martin Lipset. 1963. *Political Man; The Social Bases of Politics*, Anchor Books, Garden City, New York, hal. 27 – 53.

⁴ *Ibid.* hal. 31.

yang pernah ada. Sebuah reportase Harian Kompas (14/1/2004), misalnya, menulis laporan tentang seminar politik memulainya dengan redaksional "Dengan segala cacat yang dikandungnya, demokrasi memberi peluang untuk melakukan perubahan dengan adanya jaminan kebebasan". Ungkapan ini representasi betapa demokrasi telah memonopoli struktur epistemologis masyarakat. Tidak terlalu susah memahami demokrasi pada batas – batas yang sekedar diperlukan masyarakat untuk berpraktek demokrasi secara 'telanjang'. Persoalannya adalah ketika masyarakat kehilangan alternatif model diluar demokrasi, yang terjadi adalah ideologisasi demokrasi. Sungguh-pun demokrasi itu sendiri adalah sebuah ideologi, namun paling tidak hilangnya khasanah alternatif sama halnya dengan bentuk pembodohan atas nama pencerdasan.

Persoalan ini pula menurut hemat saya, diwanti-wanti John Rawls ketika mempersoalkan demokrasi dengan keadilan⁵. Demokrasi sebagai sistem politik

lainnya berangkat dari pengakuan akan rasionalitas dan moral individual dalam mengatur dirinya sendiri. Sementara keadilan mengandung tiga tuntutan moralitas. Demokrasi menuntut tiga hal, pertama, penentuan diri bagi setiap individu. Secara substansial pentingnya otonomi dan kemerdekaan individu⁶. Kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranan serta barang dan jasa. Ketiga, distribusi kewajiban dan tanggungjawab.⁷

Stephen Sanderson,⁸ mendekati rumusan tersebut kedalam tiga ciri utama struktur demokrasi yang lebih operasional. Pertama, para pejabat pemerintah dipilih untuk suatu jabatan tertentu, dan dipandang sebagai wakil dari kepentingan rakyat. Kedua, terdapat struktur parlemen atau kongres sebagai dasar kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan presiden atau perdana menteri. Ketiga, hak dan kebebasan individu disetujui rakyat dan dihormati.

Konsekwensi dari tuntutan pengembangan poin mengenai ke-

⁵ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

⁶ Hemat saya pewacanaan cara keberagaman yang ditampilkan rekan – rekan dari ISLIB, IIT dan Komunitas Utan Kayu, misalnya, cukup membantu proses otonomisasi individu yang digagas John Rawls. Agama masih menjadi variabel dominan dalam memperlakukan sistem sosial – politik di Indonesia (Perhatikan misalnya Clifford Gertz, Herbert Feith dan Lance Castle, Robert Hefner).

⁷ Rumusan tiga tuntutan moral utama John Rawls pada tulisan ini diambil dari ringkasan Andre Ata Ujan pada jurnal *ResponS* Vol. 1 No. 1, 1996.

⁸ Stephen K. Sanderson, 2000. *Agama Sociologi*, teri Ferid Wajidi dkk., Bojowati Dam, Jakarta, hal. 236.

bebasan individu, penentuan diri bagi setiap individu, maka demokratisasi pada level sosial merupakan gerakan otonomisasi individu. Infrastruktur sosial – budaya, yaitu pers dituntut bebas dari intervensi kekuasaan dengan segala instrumentasinya. Upaya pembatasan berbicara atau pembatasan pers bertentangan dengan konstitusi demokrasi. Kebebasan semacam ini, hemat saya, dalam masyarakat kita berekses bias pada maraknya pornografi yang tanpa mengindahkan nilai – nilai moralitas dan agama. Pola interaksi kemudian semata – mata diatur mekanisme pasar.

Kembali pada ungkapan redaksional yang ditulis reporter *Kompas* di atas, 'kebebasan' yang dimaksud tentulah harus difahami kontekstual, merujuk pada setting psikologi pewacanaan Indonesia memasuki era barunya dalam proses suksesi melalui pemilu 2004. Jadi makna kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan memilih dalam format pemilu 2004. Kebebasan diasumsikan menjadi pintu masuk perbaikan. Kalau kebebasan ini berhimpit dengan perbaikan sistem sosial yang menjamin berkembangnya petensi otonomi individu seperti yang digagas John Rawls dapat dimengerti. (Di bawah akan diurai bahwa upaya yang menjamin berkembangnya otonomi individu dari

direkayasa pada dimensi prosedural-administrasi politis sesungguhnya juga bukanlah persoalan sederhana karena memerlukan prasyarat mentalitas dan budaya). Namun kebebasan yang ditampilkan dalam sistem pemilu yang fair tidak dapat dijadikan jaminan untuk menelurkan model suksesi yang menghasilkan manusia berkualitas secara rasio dan mental. Bukankan Hitler juga konon hasil dari proses pemilihan yang fair!!

Wacana Sebagai Komoditas Politik Menjelang Pemilu

Begitulah, demokrasi dengan instrumen yang bernama pemilu telah bermukim kuat pada struktur epistemologi masyarakat. Pemilu yang jujur, adil dan rahasia sebagai implementasi ruang otonomi kebebasan individual, dalam konteks Indonesia, *toh* sesungguhnya masih membutuhkan "intervensi dari luar individu" agar pemilu memang betul menghasilkan wakil dan pemimpin yang menjunjung moralitas dan tentu saja cakap. Karena masyarakat – peserta pemilu – bukanlah barang jadi yang tinggal dipakai apabila segala infrastruktur prosedural politik telah disiapkan.

Intervensi tersebut misalnya adalah adanya gerakan untuk mencampakkan politikus busuk lemat

pemilu. Banyak kalangan memandangi Pemilu 2004 menjadi terminal kronologis sejarah Indonesia dalam mengakhiri kebusukan pada lembaga legislatif dan eksekutif. Aktifis politik muda Bara Hasibuan dalam pembukaan seminar *Indonesia 2004 Dalam Perspektif Politik dan Ekonomi : Menuju Upaya Pemulihan* di Jakarta pada 13 Januari 2004 mengatakan, "Sekarang, dengan demokrasi, kita punya senjata yang sangat dahsyat yaitu kemampuan untuk mencampakan pemimpin dan elit politik yang korup pada Pemilu 2004"⁹.

Gagasan mendasar dari seminar tersebut dan juga gerakan anti-politikus busuk adalah pewacanaan, dalam peta konstelasi kekuatan - kekuatan posisi dimana aktor terlibat politik, maka pewacanaan itu juga ditujukan pada aktor politik tertentu. Menggunakan terminologi Ralph Dahrendorf¹⁰ imperatively coordination association (ICA) .

Melalui ICA sebagai konsep analitis, bahwa sumber konflik adalah hubungan wewenang yang telah melembaga dalam asosiasi - asosiasi yang terkordinasi secara imperativ. Siapa yang mewacanakan

dan yang dikenai wacana masing - masing terikat dalam asosiasi yang terkordinasi secara imperatif.

Wacana 'pencampakan politikus busuk' yang berkembang segera dapat difahami dialamatkan kepada para politikus kawakan atau pemain politik lama dimana *track record* - nya sudah diketahui publik, sekaligus juga mengesankan bahwa mereka adalah mantan 'penikmat' posisi Orde Baru. Banyak diantara mereka masih bercokol pada lembaga - lembaga politik strategis. Arief Budiman, mantan dosen Universitas Satyawacana yang sekarang Profesor di Malbourne University mensinyalir bercokolnya pemain lama di panggung lembaga - lembaga politik memandangi sebagai kegagalan reformasi. Namun, inilah (dilema) demokrasi! Pemenggalan atau pembekuan bersifat struktural terhadap karir politik seseorang atau bahkan partai politik dan organisasi yang terlibat struktur lama justru mencederai demokrasi itu sendiri. Perilaku ini (pemenggalan struktural) pernah dilakukan Rezim Orde Baru terhadap mereka yang diduga terlibat komunis. Disinilah ujian konstruksi demokrasi, pemilu menjadi *judgment* terakhir meskipun

⁹. *Harian Kompas*, 14 Januari 2004.

¹⁰. Ralph Dahrendorf dimasukkan dalam teori sosiologi konflik kontemporer mazhab Marxian. Perhatikan, misalnya dalam Doyle Paul Johnson.1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*, terj. Robert Lawang, Gramedia, Jakarta, hal. 182 - 195.

perlu menjadi catatan bahwa pemilu tidak menjamin untuk menyaring tampilnya anak bangsa terbaik.

Hemat saya, realitas yang meng-hiasi hari – hari menjelang Pemilu 2004 sama sekali baru sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Yang membedakan dengan kondisi pemilu 2004 dengan kondisi pemilu sebelumnya adalah, pertama, adanya wacana atau gerakan anti politikus busuk. Pada Pemilu 1999 sementara kalangan masih mempercayai bahwa pemilu bakal dapat menyaring penyingkiran aktor – aktor politik yang bersandar pada Rezim Suharto. Untuk perbandingan ini tidak relefan mengambil sampel pemilu era Orde Baru dimana proses hegemoni kekuasaan berjalan sempurna, mungkin relefan dengan Pemilu tahun 1955 karena era ini oleh banyak pengamat dipandang sebagai sukses demokratis¹¹. Namun tetap saja yang membedakan Pemilu 1955 dengan Pemilu 2004 adalah gerakan anti-politik busuk ini. Kedua, secara prosedural administratif sebagai infrastruktur pemilu yang *fair* sudah relatif paling siap dibandingkan dengan era-era pemilu sebelumnya. Yaitu, Pemilu 2004 kecil sekali kemungkinan militer terlibat ke

dalam salah satu kekuatan partai politik; polisi telah lepas dari TNI; lembaga – lembaga pengontrol independen dapat hadir dengan leluasa; pers relatif bebas.

Dua kondisi ini akan menjadi batu ujian bagi demokrasi dalam melahirkan manusia yang cakap dan bermoral. Persoalannya, diseborang kekuatan yang mensosialisasikan gerakan anti-politikus busuk terdapat upaya pembersihan nama baik dengan atas nama Orde Baru. Kelompok ini tentu menjadi minoritas ditengah nuansa psikologi politik pasca jatuhnya rezim Orba. Yaitu, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dengan tegas menyatakan sebagai partai Orde Baru yang diketuai Jendral (Purn.) R. Hartono, dan mencalonkan Siti Herdiyanti Rukmana, mbak Tutut, sebagai calon presiden mendatang. Dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta, 12 Januari 2004, Ketua Umum partai ini menandakan perang wacana, "*Orde Baru itu adalah sikap mental yang menjaga kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Anti-Orde Baru berarti anti UUD 1945*"¹².

Ungkapan Ketua Umum partai yang merepresentasikan Orde Baru tersebut jelas tidak berlingung

¹¹. Lihat Herbert Feith dan Lance Castle, misalnya, pada Kata Pengantar dalam *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965* (1988), menegaskan bahwa variasi ideologi pemikiran politik Indonesia jelas tergambar dalam hasil Pemilu 1955. Artinya, jika pemilu dilakukan secara bebas tanpa intervensi dari kekuatan tertentu variasi pengelompokan atau pemikiran politik itu akan cenderung permanen.

¹². *Harian Kompas*, 13 Januari 2004.

dibelakang wacana demokrasi sebagaimana yang dilakukan oleh lawan – lawan politiknya. UUD'45 masih dipandang sakral, padahal pada tataran realitas politik UUD'45 ini sudah hampir selesai diamandemen. Demokrasi, bagi kalangan Orde Baru mempunyai tafsir yang lain dengan lawan politiknya, begitu pula cara memandang hak asasi manusia. Persaingan yang terjadi dalam pertarungan di medan pemilu antara dua kekuatan ini adalah, pertama, penguasaan desiminasi wacana, dan kedua permainan dibalik itu semua diluar persoalan menarik hati rakyat, yaitu uang (money politic). Disini pulalah dimensi persoalan demokrasi; antara otonomi individu, permainan uang, dan jauh lebih mendalam adalah persoalan *mind set*, budaya.

Selera Berdemokrasi

Pada bagian berikut ini, selera atas pilihan demokrasi hanya saya didasarkan eksplorasi pada literatur-literatur demokrasi yang beredar. Asumsinya, demokrasi bersifat perspektifal, banyak kalangan sepakat dengan demokrasi sebagai sistem politik ideal tapi persoalannya konsep ini dapat lentur ditarik – ulur dari yang paling kiri hingga paling kanan.

Seorang Foucaultian, Simon Philpott¹³ menawarkan alternatif cara memandang Indonesia. Literatur bergaya postmodern ini nampaknya pertama kali dikenalkan publik Indonesia lewat Harian Kompas, 20 Desember 2003, dalam satu halaman penuh berupa resensi yang ditulis oleh Yusraf Amir Piliang. Penggambaran Indonesia bagi Simon Philpott tidak dapat dilepaskan dari bias – bias ideologi kekuatan politik global. Penggambaran itu bukan sekedar hasil permainan budaya politik pada level lokal – internal Indonesia. Pencitraan Indonesia, artinya bagaimana Indonesia dicitrakan, ditentukan oleh kepentingan Barat. Ada pendapat, yang dimaksud 'Barat' pada hari ini adalah hanya negara – negara berbahasa Inggris, budaya Anglosekson, lebih mudah menyebutnya : Amerika. Pendapat seperti ini lahir pada pasca aneksasi Amerika atas Irak.

Dugaan saya, literatur Simon Philpott yang sesungguhnya relatif 'menyentakkan secara metodologik' ini tidak akan terlalu membuat heboh masyarakat atau masyarakat akademis. Karena tesis yang dikembangkannya tampaknya bukan barang baru, teori dependensia yang

¹³. Simon Philpott. 2000. *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*,

berkembang tahun 70-an mendahului temuan – temuan Philpott. Terakhir, setahu saya, Hasyim Wahid, adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid menulis buku kecil dengan cukup representasi bagi gaya para penganut dependensia, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan*¹⁴. Buku ini dicetak sangat terbatas, isinya tidak jauh berbeda, diantaranya ada bagian yang menggugat Amerika dalam memperlakukan tolok ukur negara berdemokrasi. Demokrasi dipandang sebagai komoditas ekonomi politik.

Selera pasar akademisi ilmu sosial dan politik, minimal di Indonesia dapat juga dijelaskan dalam merespon buku yang ditulis Richard L. Haris¹⁵ seorang cendekiawan marxis, yaitu *Marxism, Socialism and Democracy in Latin America*. Tidak seperti buku yang ditulis oleh Guillermo O'Donnell yang seluruh serinya (tiga seri) diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku Richard Haris sekedar menjadi konsumsi sangat elitis di perpustakaan – perpustakaan besar saja di Indonesia dan tidak ada peminat untuk menterjemahkan.

Pada sisi ruang ekspresi akademik, Jurnal *Wacana* yang beralamat di Yogyakarta, diawaki oleh aktifis bernada kiri seperti Mansour Fakh, Roem Topatimasang, Abdul Munir Mulkan dan lain – lain hanya sebentar memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang 'adanya pilihan di luar sana'. Hanya beberapa seri jurnal alternatif pemikiran demokrasi ini nampaknya sudah sulit ditemukan. Bandingkan dengan jurnal dan wahana lain yang mempromosikan demokrasi (baca; demokrasi liberal), mekipun sudah 'wataknya' jurnal di Indonesia kembang – kempis namun jurnal seperti ini cukup banyak pilihan. Yaitu, Jurnal *Demokrasi dan HAM*, Jurnal *Reformasi Ekonomi*, Jurnal *Prisma* (almarhum), Jurnal *Ilmu Politik*.

Maka, sejauh ini eksplorasi literatur ini sekedar mengembalikan pada konstruksi tesis yang telah disinggung di atas, terdapat hegemoni wacana yang mempersempit ruang gerak pengembangan alternatif pemikiran tipe ideal. Bahwa dalam struktur epistemologi masyarakat yang dimaksud demokrasi adalah demokrasi liberal. Hegemoni adalah sebuah penyederhanaan

¹⁴. Hasyim Wahid. 1999. *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, LkiS, Yogyakarta.

¹⁵. Richard L. Harris. 1992. *Marxism, Socialism, and Democracy in Latin America*, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford.

realitas (simplifikasi). Konsekwensinya demokrasi adalah tunggal, universal, tidak dapat diotarik ulur secara kontekstual. Dalam sebuah diskusi kecil seorang teman saya berkomentar; lantas apa bedanya jalan pikiran ini dengan fundamentalis? Yang lain menimpali, kalau seorang (demokrat) liberalis dapat dikategorikan sebagai fundamentalis, maka logikanya semua pemikiran atau ideologi adalah fundamentalis. Bahkan seorang demokrat anti fundamentalis substansinya adalah fundamentalis, karena mustahil meniadakan kleim.

Saya berpendapat wacana yang bertubrukan secara diametral tersebut belum selesai pada level akademis sekalipun, untuk sementara memang 'diselesaikan' secara hegemoni wacana (hegemonical discourse). Yaitu persoalan mendasar apakah demokrasi dapat dikontekstualkan, artinya 'dipermak' menurut konteks masyarakat atau tidak. Karena, toh, meminjam Simon Philpott di atas, dalam demokratisasi yang menjadi pokok persoalan bukan pada persoalan prosedur kelembagaan, juga bukan pada kognisi, melainkan pada mental set. Bagi universalis, mental set inilah yang pelan – pelan ke depan akan menyesuaikan dengan apa yang dipandang sebagai modernitas. Jadi, bagi universalis mental set itu sendiri ke depan arah-

Lahan untuk Tumbuhnya Demokrasi

Penelusuran struktur sosial yang melahirkan demokrasi dengan demikian sangat penting untuk merespon uraian Simon Philpott di atas mengenai kelenturan – kelenturan konteks sistem sosial dalam penilaian etika sosial politik. Terdapat dua alasan, pertama, hemat saya, adalah absah untuk 'mencurigai' (sceptic) dalam dimensi tertentu bahwa gagasan Philpott mengandung semacam *relativisme nilai*. Kedua, memahami secara empatik pada struktur sosial mana demokrasi menghadapi resistensi yang paling mendasar.

Maka berikut ini uraian pendek konteks struktur sosial berkembangnya demokrasi, setelah itu uraian singkat ini dipakai sebagai tatapan untuk memahami kecenderungan persoalan di Indonesia dalam kaitan dengan pemilu sebagai tolok ukur demokrasi yang paling mudah dibaca.

Secara hitam – putih masyarakat kontemporer mengenal dua model sistem politik yang saling berseberangan. Pertama, demokrasi parlementer yang banyak dianut negara – negara berkarakter kapitalis industri Eropa Barat dan Amerika Utara. Di sini bentuk ekonomi kapitalis identik dengan demokrasi (parlementer). Bentuk kedua, diktator totaliterian, dianut

Eropa Timur. Sistem politik ini identik dengan bentuk ekonomi sosialis.¹⁶

Mengapa demokrasi muncul di Eropa Barat dan Amerika? Barrington More¹⁷ mencatat ada minimal lima faktor yang diduga mendorong lahirnya demokrasi parlementer di Inggris dan Prancis. Pertama, adanya pertimbangan untuk mencegah terlalu kuatnya monarki dan terlalu bebasnya bangsawan pemilik tanah. Kedua, adanya evolusi pertanian kearah komersial atau kapitalis. Ketiga, melemahnya kekuasaan politik dan ekonomi kaum bangsawan. Keempat, gagalnya koalisi kaum bangsawan – kapitalis melawan kaum tani dan pekerja. Kelima, adanya kesempatan revolusioner.

Pada tahap awal masa modern dimulainya transformasi dari negara-negara feodal yang bercirikan desentralisasi menjadi negara – negara birokratis yang tersentral. Pergeseran tersebut karena adanya krisis cara produksi feodal dan

munculnya ekonomi kapitalis. Krisis atau pergeseran ini adalah awal dari sebuah negara modern monarki absolut. Pengertian negara dalam konteks ini intervensi tangan penguasa terhadap berbagai segmen masyarakat yang jauh lebih intensif dibandingkan dengan (negara) pada era feodal. Era seperti ini di Prancis terjadi dipenghujung abad ke-17 dibawah pemerintahan Luis ke-14, di Spanyol berbarengan dengan Inggris pada abad ke-15.

Catatan penting disini, monarki – monarki absolut Eropa muncul bersamaan dengan runtuhnya feodalisme dan timbulnya ekonomi kapitalis. Konstelasi politiknya adalah absolutisme berfungsi sebagai penyangga kaum bangsawan pada perubahan ekonomi tersebut, dengan kata lain absolutisme adalah suatu bentuk kekuasaan baru dari kelas bangsawan ketika kekuatan tradisionalnya hancur disebabkan hadirnya kapitalisme.

¹⁶. Istilah – istilah seperti demokrasi parlementer vs. diktator totaliterian; kapitalisme vs. sosialisme adalah penyederhanaan dari realitas yang sesungguhnya jauh lebih bervariasi. Misalnya, pada sosialisme, dikenal berbagai genrenya seperti 'sosialisme demokratis', yaitu pada hari ini ditemukan pada beberapa negara industri maju seperti Jerman dan Swedia, 'sosialisme non-marxis', 'sosialisme utopis', 'sosialisme –science-movement'. Belakangan istilah – istilah tersebut masih dirasakan kurang pas untuk mengkategorikan Cina yang akan mengamandemen konstitusinya. Cina yang *nota bene* menganut komunis mengejutkan dunia dengan rencana amandemen konstitusi, diantaranya pemberian jalan bagi kepemilikan pribadi dan kesempatan politik bagi kaum kapitalis di RRC. Begitu pula dengan istilah demokrasi, diluar demokrasi liberal yang paling populer, dikenal demokrasi radikal. (Lihat Jurnal Wacana Edisi 2, Tahun 1, 1999). Setahu saya hanya pengalaman di Indonesia yang meletakkan demokrasi dengan variasi lain, yaitu 'Terpimpin' –sera Sukarno dan 'Pancasila' – era Suharto.

¹⁷. Barrington Moore, Jr. 1966. *Social Origin of Diktatorship and Demokrasi*, Beacon Press, Boston,

Kuatnya ancaman yang dihadapi kaum borjuis – kapitalis kepada tuan tanah sebagai artikulasi dari kaum feodal, kaum feodal iniberlindung dibalik monarki absolut. Maka negara modern di Eropa Barat dibentuk atas kehendak golongan aristokrat yang memiliki tanah. Namun kemudian dalam perkembangannya negara ini memperoleh kebebasan dari kelas, sebagai akibat lebih lanjut negara berfungsi melayani kepentingan ekonomi yang seringkali bertentangan dengan kepentingan aristokrat itu sendiri. Bertentangan dengan kepentingan kaum aristokrat pada dasarnya dengan sendirinya memperluas kelas kapitalis.

Di Perancis, revolusi Perancis pada dekade terakhir abad ke-18 meluluhkan hak-hak istimewa kaum aristokrat, monarki dan bangsawan pemilik tanah, mengangkat hak milik pribadi dan kedudukan yang sama bagi warga. Tahap inilah pembuka jalan bagi ekonomi kaum borjuasi, kapitalis. Sementara di Amerika kelas ekonomi atas muncul pada pasca revolusim, maka pengaruh mereka terhadap pemerintahan sangat menyolok. Struktur konstitusi Amerika dibangun oleh kelas ekonomi atau kapitalis tersebut. Dapat difahami bahwa

konstitusi ditulis untuk melindungi hak – hak istimewa para pemilik harta pribadi.

Kesimpulannya demokrasi muncul dalam mekanisme ekonomi kapitalis. Karena kelas kapitalislah yang membutuhkan suatu negara demokrasi. Untuk dapat mengakumulasikan keuntungan, kaum kapitalis perlu menetralkan campur tangan pemerintah.

Berdemokrasi ala Indonesia

Mangacu pada sejarah, demokrasi selalu berhimpit dengan hadirnya kapitalisme dan kelas menengah yang mandiri. Struktur semacam ini masih merupakan persoalan bagi Indonesia yang dalam banyak literatur diragukan adanya kelas menengah yang mandiri.

Disini menarik uraian Nasikun pada Harian Kompas¹⁸, ketika banyak orang menghawatirkan golput pada pemilu 2004 karena teknisnya yang rumit, ia memberi judul artikelnya *Golput, Siapa Takut ? Menurut pendapatnya golput di Indonesia minimal pada Pemilu 2004 tidak perlu dikhawatirkan. Tulisan ini sama sekali bukan menampilkan sebuah pandangan optimis tentang partisipasi dan demokrsi politik di Indonesia.*

¹⁸ Harian Kompas, 6 Januari 2003.

Karena justru, ia memprediksi Pemilu 2004 golput akan kecilnya, sekaligus juga terdapat permasalahan mendasar dalam demokrasi di Indonesia. Pasalnya perilaku memilih masih jauh dari rasional namun masih didominasi oleh sistem politik kesukuan atau aliran. Tulisnya,

Ti adanya lapisan tebal kelas menengah yang "independen", kehidupan politik di Indonesia sampai saat ini masih sangat kental ditandai dengan ciri-ciri berikut. Pada sistem kepartaian yang berkembang di Indonesia selama ini, semua partai politik peserta pemilu mempunyai ciri sebagai organisasi yang bersifat "patrimonial" dan "hegemonik" yang legitimasinya bersumber di dalam kekuasaan "ideologis" yang dibangun melalui keunggulan kualitas kepribadian atau kharisma yang istimewa para pemimpin mereka

Kalangan kita di Indonesia seringkali melakukan *excuse* dengan membandingkan pada sejarah panjang di Eropa Barat atau Amerika. Pembelajaran demokrasi di Eropa Barat dan Amerika berangkat dari sejarah yang sangat panjang, yang dimaksud pergeseran merujuk pada cara produksi. Pergeseran cara produksi diikuti

perubahan pada struktur sosial, melalui waktu yang panjang merubah pula struktur mentalitas.

Di Indonesia konsep demokrasi belum lama dikenal¹⁹. Perjuangan terhadap hak – hak individual pun nyaris sangat baru, padahal menjadi prinsip bagi mengembangkan demokrasi. Sehingga prosedur demokrasi dihadirkan jauh meninggalkan mentalitas, terdapat *gap* antara keduanya. Meskipun tentu saja pada sisi prosedural masih juga besar persoalannya disebabkan mentalitas (budaya). Persoalan prosedural menyangkut format aturan permainan interaksi sosial, sementara mentalitas menyangkut bagaimana mengisi format prosedural tersebut.

Bagaimana 'keabsahan' *excuse* semacam itu? Hemat saya memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah panjang membentuk karakter berpolitik. Hal tidak rasional adalah ketika *excuse* menjadikan sebuah legitimasi, menjadi alat penyucian normativ atas realitas yang berlangsung terus menerus. Sama halnya dikalangan akademisi ketika mempelajari tema budaya politik. Istilah budaya politik terkadang menimbulkan sinisme, lantaran konsep ini tidak lebih sekedar menjadi argumen dan dalil ilmiah

¹⁹. Perhatikan, Syamsudin Haris. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan pengalaman*, LP3ES, Jakarta.

dalam melegetimasipraktek politik. Yang tidak disadari bahwa budaya tidak sekedar menjadi dasar tingkah laku, tetapi juga dibentuk oleh tingkah laku. Dasar pembentukan inilah terletak posisi moralitas yang sesungguhnya tidak lagi dapat ditawarkan.

Meskipun prosedur pemilu sebagai karakter utama demokrasi eksis, persoalannya kemudian dapat dilihat pada kualitas proserudal itu sendiri. Pada level ini, misalnya masih terdapat tiga undang - undang yang sangat berpotensi disalah gunakan penguasa dalam pesta demokrasi tahun 2004. Yaitu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, Undang - Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, serta Pasal Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Tindakan Makar) dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Alasan kecurigaan terhadap prosedur format perilaku kekuasaan yang dituang dalam tiga undang - undang ini bersumber dari kerangka marxian²⁰. Kaum marxis kontemporer memahami bahwa fungsi negara kapitalis ada tiga; legitimasi, penindasan dan akumulasi. Penindasan (repreition) dilakukan bila legetimasi gagal,

legitimasi adalah semacam sosialisasi ideologi politik untuk memelihara konsensus dasar. Penindasan dimaksudkan sebagai upaya mencegah rakyat mengambil tindakan - tindakan yang dapat merugikan negara dan sistem kapitalis.

Fungsi kumulasi mencakup penetapan kebijakan yang membantu kelas kapitalis dalam mengumpulkan modal. Dalam banyak kasus yang terjadi pemerintah membuat undang - undang jalan keluar pajak bagi yang kaya dan menggeser beban pajak itu pada masyarakat biasa.

Dari ketiga poin tersebut yang paling mungkin dilakukan pemerintah memperlakukan tiga undang - undang dalam kerangka percederaan terhadap pemilu atau pesta demokrasi adalah pada poin pertama, penindasan. Meskipun dapat terjadi secara simultan, lewat penindasan sesungguhnya telah pula melakukan legitimasi dan akumulasi seca rasekaligus. Realitas ini telah dilakukan rezim Orde Baru dengan amat parah hingga masyarakat kehilangan struktur jati dirinya. Hilangnya struktur jati diri ini *disorganized*, padahal inilah (kemampuan mengorganisasi diri) yang juga menjadi syarat penting bagi masyarakat demokratis. Tetapi, memang kekuasaan yang cenderung tidak demokratis akan selalu mengusahakan masyarakat itu *disorganized*.

²⁰ Lihat misalnya, Ralph Miliband, 1977, *Marxism and Politics*, Oxford University Press, Oxford

DAFTAR PUSTAKA

- Feith, Herbert dan Lance Castles (edt.). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*, LP3ES, Jakarta.
- Harris, Richard L. 1992. *Marxism, Socialism and Democracy in Latin America*, Westview Press, Boulder, San Fransisco.
- Haris, Samsudin. 1994. *Demokrasi di Indonesia : Gagasan Dan Pengalaman*, LP3ES, Jakarta.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*, terj. Robert Lawang, Granedia, Jakarta
- Lipset, Seymour Martin. 1963. *Political Man : Social Bases of Politic*, Anchor Books, Garden City, New York.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia*, terj. Ari Setyningrum, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Miliband, Ralph. 1977. *Marxism and Politic*, Oxford Univeersity Press, Oxford.
- Moore, Barrington Jr. 1966. *Social Origin of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston.
- Philpott, Simon. 2000. *Rethinking Indonesia; Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*, Macmillan Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts.
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wajidi dkk., Rajawali Press, Jakarta.
- Wahid, Hasyim. 1999. *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, LkiS, Yogyakarta.